

Peran Lapas dalam Mendorong *Self-Improvement* Pembinaan Narapidana Geng di Lapas Kelas IIA Bogor

Alrizki Indrawan¹, Meitisa Vanya Simanjuntak²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: Alrizkibimsky@gmail.com¹, tisa.vania@gmail.com²

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 19 Desember 2025

Accepted: 09 Januari 2026

Keywords:

Self-Improvement, narapidana geng, pembinaan, lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lapas Kelas IIA Bogor dalam mendorong *Self-Improvement* bagi narapidana yang tergabung dalam kelompok geng, guna mengarahkan mereka menuju perubahan diri yang positif dan kesiapan reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap petugas lapas serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas berperan signifikan sebagai fasilitator rehabilitasi melalui pembinaan kepribadian, spiritual, sosial, dan keterampilan. Program tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran diri, pengendalian emosi, motivasi internal, empati, serta keterampilan sosial narapidana. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti dominasi solidaritas geng, rendahnya kesadaran perubahan, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan pada motivasi eksternal. Kesimpulannya, pembinaan berbasis *Self-Improvement* dapat menjadi strategi efektif dalam rehabilitasi narapidana geng jika didukung oleh pendekatan personal, komunikasi empatik, dan program berkelanjutan. Saran penelitian adalah peningkatan kapasitas petugas, penguatan strategi pembinaan, serta kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat proses transformasi narapidana.

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih menekankan hak asasi manusia (HAM), keadilan restoratif, dan reintegrasi sosial. Regulasi ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar bentuk penghukuman, tetapi juga bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 UU ini

menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip pengayoman, keadilan, dan penegakan hukum, sehingga pembinaan bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai upaya rehabilitasi dan pembinaan karakter agar narapidana dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang memiliki fungsi utama dalam membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam menjalankan tugasnya, Lapas tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pemenuhan hak-hak dasar narapidana, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter serta membekali mereka dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas. Lapas di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lapas tidak terlepas dari masalah serta kendala yang membuat pembinaan berjalan kurang efektif (Mubarokah & Larasati, 2023).

Interaksi sosial antar narapidana dalam lingkungan Lapas yang terbatas sering kali membentuk hubungan sosial yang erat dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta solidaritas di antara mereka. Namun, interaksi yang intens ini juga dapat memicu terbentuknya kelompok-kelompok atau geng di dalam Lapas yang biasanya didasarkan pada kesamaan latar belakang, kepentingan, atau kebutuhan untuk saling melindungi, sehingga keberadaannya dapat mempengaruhi dinamika kehidupan di dalam Lapas baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, kelompok tersebut dapat memberikan dukungan emosional dan rasa aman bagi anggotanya, tetapi di sisi lain dapat memicu konflik antar kelompok dan menghambat proses rehabilitasi (Mubarokah & Larasati, 2023). Selain itu, intensitas interaksi sosial juga dapat menjadi sarana pertukaran informasi, termasuk pengetahuan tentang tindak kejahatan melalui berbagi pengalaman atau cerita antar narapidana, yang berpotensi meningkatkan keterampilan atau pengetahuan kriminal di kalangan narapidana dan bertentangan dengan tujuan rehabilitasi, sehingga pengawasan dan pengelolaan interaksi menjadi penting untuk mencegah terbentuknya subkultur negatif yang dapat menghambat proses pembinaan (Daffanur, 2018). Penelitian Citrawan dan Zainudin (2018) menunjukkan bahwa konflik di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya karena lapas merupakan lingkungan terisolasi yang membatasi kebebasan narapidana, mengharuskan mereka mematuhi otoritas petugas, dan diisi oleh individu dengan masalah sosial akibat tindak pidana, sementara keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan dan fasilitas lapas yang terbatas turut mempengaruhi dinamika tersebut. Konflik di dalam Lapas tidak terlepas dari adanya subkultur penjara, yaitu sistem norma, nilai, dan pola perilaku yang berkembang di lingkungan penjara, di mana aturan subkultur tersebut dapat dituntut oleh narapidana sebagai bentuk kepatuhan, normalisasi, dan pelaksanaan kekuasaan (Citrawan & Zainuddin, 2015).

Sykes dalam Mubarokah & Larasati (2023) menjelaskan bahwa kehidupan di dalam penjara memunculkan norma-norma baru akibat tekanan yang dialami narapidana, sehingga nilai dan norma yang berlaku di luar menjadi tidak relevan. Subkultur penjara secara umum ditandai oleh eksploitasi, ketidakpercayaan, persahabatan oportunistik, hierarki sosial, kerahasiaan, dan sikap antitoriter, yang merupakan bentuk adaptasi narapidana terhadap kondisi kehidupan penjara yang penuh dengan pembatasan, seperti hilangnya keamanan, otonomi, kebebasan, hubungan heteroseksual, serta akses terhadap barang dan jasa. Dalam lingkungan ini terbentuk hierarki sosial yang berbeda dengan masyarakat luar, di mana individu yang memiliki kekuatan, seperti anggota geng atau mereka yang memiliki keterampilan tertentu, memiliki pengaruh besar. Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sarat akan konflik dan ketegangan akibat persaingan sumber daya,

perbedaan etnis, perselisihan pribadi, hingga keberadaan geng yang memperparah potensi kekerasan. Kondisi ini membuat narapidana hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan terhadap ancaman fisik. Berdasarkan penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, diketahui bahwa berbagai tindak pidana seperti penganiayaan antar narapidana, penyalahgunaan narkoba, upaya melarikan diri, pencurian, hingga kejahatan lain kerap terjadi di dalam lapas, yang tidak hanya mengganggu keamanan tetapi juga mempengaruhi pola pembinaan. Oleh karena itu, penegakan sanksi hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan di dalam lapas menjadi hal penting guna menjaga ketertiban dan efektivitas pembinaan (Sari *et al.*, 2023).

Penelitian Wiratama (2021) mengungkapkan bahwa konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dipicu oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah satunya adalah kondisi overkapasitas, di mana kamar hunian yang seharusnya menampung 4–5 orang terisi lebih dari 20 orang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan meningkatkan potensi konflik antar narapidana, baik dalam satu kamar maupun antar blok. Selain itu, kurangnya pengawasan petugas, ketidakmerataan pemahaman terhadap tugas dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), serta munculnya hubungan pribadi yang berlebihan antara narapidana dan petugas demi kenyamanan bersama dapat memicu praktik suap, perlakuan yang berbeda, dan kecemburuan sosial. Sementara itu, faktor eksternal penyebab konflik mencakup tidak adanya kunjungan keluarga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghapus stigma negatif terhadap mantan narapidana, serta kondisi ekonomi keluarga narapidana yang umumnya tidak mampu (Sutra, 2020). Konflik tersebut seringkali berkembang menjadi kekerasan seperti cekcok, perkelahian, bahkan kerusakan, sebagaimana terjadi di Lapas Kelas IIA Bogor dan Lapas Kelas II Permisian Nusakambangan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Kasus lain berupa perundungan seperti penyiraman air got oleh sekelompok geng terhadap narapidana lain yang kemudian viral di media menunjukkan bahwa kekerasan dan konflik merupakan bagian nyata dari kehidupan di dalam lapas (Nazar, 2023).

Salah satu penyebab utama terjadinya konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah keberadaan geng, yaitu komunitas kecil yang terbentuk atas dasar kesamaan latar belakang seperti etnis, daerah asal, atau domisili. Meskipun pada awalnya geng dapat menjadi sarana terciptanya keakraban dan solidaritas antar narapidana, keberadaan banyak geng justru sering memicu persaingan dan konflik antar kelompok, karena loyalitas mereka terbatas hanya pada kelompoknya sendiri. Kondisi ini menghambat interaksi sosial yang lebih luas dan menciptakan ancaman terhadap keamanan serta keselamatan narapidana lainnya maupun petugas lapas (Mubarokah & Larasati, 2023). Oleh karena itu, lapas harus berperan sebagai penetralisir konflik dengan menyediakan program pembinaan, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam geng. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan diri atau *Self-Improvement*, yaitu upaya untuk meningkatkan keterampilan, kualitas hidup, pola pikir, serta kebiasaan positif. Kesadaran akan potensi diri dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sangat penting dalam proses ini, sebagaimana dikemukakan oleh Pasiak (2017) bahwa kepercayaan diri merupakan kunci keberhasilan dalam perubahan. Lingkungan yang mendukung, terutama keluarga, juga berperan penting dalam membentuk karakter, nilai budaya, etika, dan keterampilan individu. Dengan adanya pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas diri, narapidana diharapkan dapat mengalihkan energi negatif dari dinamika geng menjadi kekuatan positif untuk perubahan diri, sehingga potensi konflik di dalam lapas dapat diminimalisir.

Tambunan (2018) menyatakan bahwa *Self-Improvement* atau pengembangan diri dapat berlangsung karena adanya dorongan (*drives*) yang mencakup tiga jenis tujuan, yaitu tujuan yang bersumber dari konsep diri, tujuan yang didorong oleh hayalan, serta tujuan yang dipengaruhi oleh

emosionalisme. Dalam proses memperbaiki diri, individu perlu menerima dan mencintai dirinya apa adanya (Tambunan, 2008). Hasibuan (2014) menambahkan bahwa *Self-Improvement* berkaitan erat dengan kejujuran, kasih sayang, dan integritas diri, yang dapat dibangun melalui berbagai cara seperti memahami diri sendiri, mengenali tujuan hidup, terus meningkatkan kapasitas, menonton film bermanfaat, tidak berhenti belajar, dan rajin membaca buku. Buku berperan penting sebagai sumber informasi dan sarana pengembangan diri, karena dapat menumbuhkan kepercayaan diri serta membantu individu mengatasi rasa tidak aman (*insecure*), terutama pada generasi muda. Selain itu, *Self-Improvement* memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan emosional, termasuk dalam penguasaan teknik manajemen stres untuk menghadapi berbagai masalah hidup (Dambi *et al.*, 2016). Dalam pembinaan narapidana, program pengembangan potensi sangat bergantung pada pendekatan yang mencakup keterampilan teknis, dukungan psikososial, akses terhadap peluang kerja, dan sistem pendampingan yang kuat (Saputra *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pemberian bimbingan psikologis dapat membantu mereka mengatasi hambatan emosional dan mental, yang pada akhirnya menjadi alasan penting bagi penulis untuk meneliti “Peran Lapas dalam Mendorong *Self-Improvement* Pembinaan Narapidana Gangster di Lapas Kelas IIA Bogor”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial, aktivitas, persepsi, sikap, serta pengalaman individu atau kelompok dalam konteks kehidupan nyata (Creswell, 2014). Metode ini tidak hanya mengumpulkan data faktual, tetapi juga mengeksplorasi makna dan sudut pandang subjektif dari subjek penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kehidupan sosial di dalam Lapas. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami peran Lapas Kelas IIA Bogor dalam mendorong *Self-Improvement* bagi narapidana yang tergabung dalam kelompok geng. Penelitian dilakukan secara naturalistik melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aspek pembinaan yang berlangsung, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Desain penelitian ini berfokus pada analisis peran Lapas Kelas IIA Bogor dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang tergabung dalam geng, dengan subjek penelitian meliputi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, staf pengamanan, serta tiga orang narapidana yang diduga terlibat dalam kelompok geng. Penentuan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Moelong, 2007). Sumber data yang mencakup data primer yaitu wawancara langsung dengan informan dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi lapas, laporan tahunan, regulasi pembinaan, dan literatur ilmiah terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi partisipatif terhadap dinamika sosial di dalam lapas, serta wawancara mendalam menggunakan teknik semi-terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, penyusunan, pengkajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lapas dalam Mendorong Pembinaan *Self-Improvement* bagi Narapidana yang Tergabung Kelompok Geng

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara mendalam.

Observasi dilakukan secara langsung di Lapas Kelas IIA Bogor untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pembinaan, khususnya terkait aspek perubahan perilaku narapidana yang tergabung dalam kelompok geng. Studi dokumen digunakan untuk memahami kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan prosedur resmi yang mendasari kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun wawancara dilakukan dengan petugas lapas dan narapidana sebagai informan utama, guna menggali pemahaman mereka mengenai proses pembinaan *Self-Improvement*, kendala yang dihadapi, serta dinamika peran dan respons warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Berikut ini adalah data informan yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Data Informan

No.	Jabatan	Nama	Kode
1	Staf KPLP	Ramdani Pratama	Informan 1
2	Narapidana	Deden Sumardi	Informan 2
3	Narapidana	Ery Gamdani	Informan 3

Sumber Primer: Diolah Penulis

Karakteristik informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga narasumber yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka dalam proses pembinaan narapidana terkait pengembangan *Self-Improvement* di Lapas Kelas IIA Bogor. Informan 1 adalah staf KPLP yang berperan dalam pengawasan, keamanan, dan pelaksanaan program pembinaan, sehingga memahami dinamika interaksi serta tantangan dalam mendampingi narapidana, termasuk dari kelompok geng. Informan 2 merupakan narapidana yang aktif mengikuti pembinaan keagamaan, keterampilan, dan rehabilitasi, serta memiliki pengalaman pribadi dalam mengubah sikap dan menjauh dari nilai kekerasan. Sementara itu, Informan 3 juga berasal dari latar belakang geng, menunjukkan keinginan untuk berubah, dan aktif dalam pembinaan spiritual serta sosial. Ketiga informan ini dipilih karena peran dan pengalamannya memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pembinaan *Self-Improvement*, proses perubahan perilaku, serta tantangan yang dihadapi dalam reintegrasi narapidana.

1. Teori Peran

Teori peran merupakan konsep sosiologis yang menjelaskan bagaimana individu atau institusi menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan harapan yang melekat pada posisi tertentu. Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Lapas menjalankan perannya sebagai institusi negara yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina, merehabilitasi, dan membentuk kembali perilaku narapidana, khususnya yang berasal dari kelompok geng. Lapas dipandang sebagai aktor sosial dengan tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan, membangun harapan, mengelola interaksi, menyelesaikan konflik, dan menghadapi tantangan kebijakan secara dinamis dalam upaya membentuk individu menjadi lebih baik.

a. Dimensi Harapan Peran (*Role Expectations*)

Dimensi harapan peran menunjukkan bagaimana Lapas merespons ekspektasi sosial dan moral untuk membina narapidana, khususnya dari kelompok geng, agar mengalami perubahan diri secara nyata. Harapan tersebut diwujudkan melalui berbagai program seperti pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan karakter yang dirancang tidak hanya untuk mengisi waktu hukuman, tetapi juga membantu narapidana menginternalisasi nilai-nilai baru dalam kehidupan sehari-hari. Informan menyebutkan bahwa kegiatan rutin seperti mengaji, diskusi kelompok, dan pelatihan mental menjadi sarana efektif untuk membentuk kesadaran, memperbaiki perilaku, serta menciptakan suasana

pembinaan yang tidak memaksa. Pendekatan ini membuat ekspektasi lembaga tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pengalaman hidup narapidana. Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa proses internalisasi harapan berjalan melalui interaksi yang konsisten, pendekatan yang humanis, dan suasana yang mendukung refleksi diri. Partisipasi aktif narapidana dalam kegiatan religius dan sosial membuktikan bahwa mereka tidak hanya memahami peran baru yang diharapkan, tetapi juga mulai menjalankannya secara sukarela. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pembinaan berbasis spiritual dan sosial dapat memperkuat identitas moral serta kesiapan reintegrasi setelah bebas.

b. Dimensi Perilaku Peran (*Role Behavior*)

Dimensi perilaku peran menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan Lapas sebagai institusi pembinaan dalam menjalankan ekspektasi sosialnya, bukan sekadar menyusun program atau aturan. Di Lapas Kelas IIA Bogor, perilaku ini tercermin melalui keterlibatan aktif petugas dalam setiap kegiatan pembinaan, mulai dari mendampingi pengajian, memfasilitasi pelatihan keterampilan, hingga memimpin diskusi reflektif. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan arahan, motivasi, serta dukungan emosional kepada narapidana. Kehadiran mereka secara konsisten menciptakan suasana pembinaan yang lebih manusiawi dan dialogis, sehingga narapidana merasa dihargai, diterima, dan termotivasi untuk berpartisipasi secara sadar. Interaksi yang terbuka dan empatik ini memperkuat kepercayaan narapidana terhadap lembaga, sekaligus menjadi teladan sosial yang mendorong perubahan perilaku dari dalam diri mereka. Observasi lapangan menunjukkan bahwa perilaku peran juga tercermin dalam rutinitas pembinaan yang terstruktur, evaluasi pasca kegiatan, hingga pendekatan restoratif ketika terjadi pelanggaran ringan. Nilai-nilai seperti disiplin, empati, dan kerja sama tidak hanya diajarkan, tetapi diteladankan oleh petugas dan secara bertahap diinternalisasi oleh narapidana, terlihat dari meningkatnya keterlibatan, kerja sama kelompok, dan perubahan sikap sehari-hari. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun budaya pembinaan yang sehat dan partisipatif, di mana narapidana bukan hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena merasa didukung dalam proses perubahan diri.

c. Dimensi Konflik Peran (*Role Conflict*)

Konflik peran (*role conflict*) dalam konteks pemasyarakatan merupakan situasi ketika Lapas dihadapkan pada dua tuntutan yang sama penting namun sering kali bertolak belakang, yaitu fungsi pengamanan dan fungsi pembinaan narapidana. Di satu sisi, Lapas bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar tidak terjadi gangguan seperti perkelahian, pelarian, atau ancaman dari luar. Di sisi lain, Lapas juga berperan sebagai lembaga rehabilitasi yang harus memberikan pembinaan berkelanjutan demi mendukung proses perubahan perilaku narapidana. Ketika dua peran ini tidak dijalankan secara sinergis, muncul ketegangan dalam pelaksanaannya yang berdampak langsung terhadap efektivitas program pembinaan. Hal ini terlihat dari kesaksian beberapa informan yang menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan sering terhenti akibat prioritas pengamanan, seperti razia mendadak atau pengawasan insiden. Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan kebingungan, kekecewaan, bahkan menurunkan motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan, sekaligus memperlemah hubungan emosional dan kepercayaan mereka terhadap sistem pemasyarakatan. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa konflik peran tidak hanya memengaruhi dinamika sosial di dalam Lapas, tetapi juga menurunkan kualitas rehabilitasi secara keseluruhan. Ketika petugas

terbebani oleh peran ganda yang tidak seimbang, mereka cenderung bersikap birokratis dan kurang partisipatif, sehingga narapidana merasa hanya diawasi tanpa benar-benar dibimbing. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan jarak psikologis antara petugas dan narapidana, serta menghambat proses internalisasi nilai-nilai pembinaan.

d. Dimensi Ambiguitas Peran (*Role ambiguity*)

Ambiguitas peran (*role ambiguity*) dalam konteks pemasyarakatan terjadi ketika tidak ada kejelasan yang memadai mengenai tugas, tujuan, maupun ekspektasi yang harus dijalankan, baik oleh petugas maupun narapidana. Ketidakjelasan ini sering muncul karena informasi yang diberikan tidak konsisten, tidak lengkap, atau berubah-ubah tanpa penjelasan yang memadai. Dalam praktiknya, situasi ini menimbulkan kebingungan tentang arah program pembinaan, tujuan kegiatan, hingga pentingnya peran rehabilitasi itu sendiri. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa narapidana kerap mengikuti kegiatan tanpa memahami manfaat atau arah yang ingin dicapai, bahkan menganggap pembinaan sebagai formalitas semata. Di sisi lain, petugas pun mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara tepat karena tidak ada pedoman yang jelas. Akibatnya, proses pembinaan kehilangan makna transformasionalnya, keterlibatan narapidana menurun, dan efektivitas program menjadi lemah. Penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas peran yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya mengganggu jalannya pembinaan, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, seperti stres dan penurunan motivasi baik pada narapidana maupun petugas. Ketika ekspektasi peran tidak dikomunikasikan secara sistematis, narapidana cenderung bertindak berdasarkan asumsi masing-masing, sementara petugas terjebak dalam rutinitas birokratis yang tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang terstruktur, seperti penyediaan jadwal dan tujuan kegiatan yang jelas, briefing awal, serta pelatihan bagi petugas dalam menyampaikan tujuan pembinaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Upaya ini penting untuk menciptakan keselarasan persepsi, meningkatkan partisipasi narapidana, dan memastikan bahwa pembinaan berjalan sesuai tujuan rehabilitatifnya.

e. Dimensi Kelebihan Beban Peran (*Role Overload*)

Kelebihan beban peran (*role overload*) dalam konteks pemasyarakatan terjadi ketika lembaga maupun petugas harus menjalankan berbagai tanggung jawab yang melebihi kapasitas sumber daya yang dimiliki. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai institusi pengamanan, tetapi juga menjalankan peran penting dalam rehabilitasi, pelayanan sosial, administrasi hukum, hingga pembinaan keagamaan. Ketika semua peran ini dilakukan secara bersamaan tanpa pembagian tugas yang proporsional, beban kerja menjadi tidak seimbang dan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas kerap kewalahan membagi waktu antara pekerjaan administratif dan kegiatan pembinaan, sehingga banyak program yang tertunda, dijalankan secara terburu-buru, atau bahkan dibatalkan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan narapidana yang merasa kegiatan pembinaan tidak konsisten dan tidak dijalankan secara serius. Ketika petugas kelelahan atau tertekan oleh beban kerja, interaksi yang seharusnya bersifat humanis dan edukatif pun berubah menjadi sekadar rutinitas birokratis tanpa makna transformasional. Analisis hasil observasi memperkuat temuan tersebut, menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan menyebabkan pembinaan kehilangan kontinuitas, kedalaman materi, dan kualitas pendampingan. Petugas yang terfragmentasi tugasnya tidak memiliki cukup waktu untuk merancang program secara terstruktur atau membangun hubungan interpersonal yang bermakna dengan narapidana. Penelitian juga menunjukkan bahwa overload dapat

menurunkan kepuasan narapidana, meningkatkan stres kerja, dan menciptakan jarak sosial yang menghambat proses rehabilitasi. Untuk mengatasi hal ini, Lapas perlu menerapkan strategi manajemen beban kerja melalui pembagian peran yang lebih spesifik, pembentukan unit pembinaan khusus, serta pelatihan manajemen waktu bagi petugas.

f. Dimensi Persepsi Peran (*Role Perception*)

Persepsi peran (*role perception*) merupakan aspek penting dalam teori peran yang menentukan bagaimana individu atau institusi memahami, menginternalisasi, dan menjalankan peran sosialnya. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, persepsi ini tidak hanya sebatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pembinaan dan agen perubahan sosial bagi narapidana. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketika petugas benar-benar memahami perannya, mereka tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi juga membangun relasi yang hangat, komunikatif, dan penuh empati. Sebaliknya, persepsi peran yang sempit membuat interaksi bersifat birokratis dan mekanis, sehingga kegiatan pembinaan kehilangan makna transformasionalnya. Narapidana mampu membedakan petugas yang menjalankan perannya dengan kesadaran dan kepedulian, dan hal ini terbukti berpengaruh terhadap motivasi serta partisipasi mereka dalam program pembinaan. Selain itu, persepsi peran yang positif mendorong petugas untuk lebih proaktif dalam mengembangkan metode pembinaan, memperkaya materi, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi proses rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peran yang kuat meningkatkan efektivitas pembinaan karena menciptakan hubungan yang lebih terbuka, penuh kepercayaan, dan mendukung perubahan perilaku narapidana. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa kelompok yang dipandu oleh petugas dengan persepsi peran baik menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang lebih tinggi.

2. Teori *Self-Improvement*

Teori *Self-Improvement* merupakan kerangka psikologis dan sosial yang menekankan pentingnya perubahan diri secara sadar dan berkelanjutan menuju kondisi yang lebih positif dan produktif. *Self-Improvement* menitikberatkan pada aspek kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, motivasi untuk berkembang, empati terhadap orang lain, dan keterampilan sosial yang memungkinkan seseorang hidup harmonis dalam masyarakat.

a. Dimensi *Self-Awareness* (kesadaran diri)

Self-awareness menjadi fondasi utama dalam proses rehabilitasi narapidana, karena memungkinkan mereka memahami pikiran, emosi, nilai, serta tindakan secara jujur dan reflektif. Dalam konteks pembinaan di Lapas, kesadaran diri menjadi langkah awal untuk memutus pola perilaku destruktif dan mengarahkan hidup ke arah yang lebih konstruktif. Proses ini tidak mudah, terutama bagi narapidana yang sebelumnya hidup dalam sistem nilai geng yang kuat dan sering bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Melalui program pembinaan seperti kegiatan keagamaan, refleksi diri, penulisan jurnal, serta sesi berbagi pengalaman, narapidana diajak merenungkan masa lalu, mengenali penyebab dari perilaku menyimpang, dan mulai memikirkan masa depan. Banyak narapidana yang awalnya menyalahkan lingkungan atau sistem hukum akhirnya menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri sendiri. Proses ini bersifat bertahap dan sangat bergantung pada lingkungan yang aman, empatik, dan bebas dari penilaian negatif, sehingga peran petugas dalam menciptakan atmosfer tersebut menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran diri berkorelasi positif dengan pengendalian emosi, ketahanan mental, serta kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Ketika narapidana mulai mengenali kekuatan dan kelemahannya, mereka menjadi lebih mampu mengelola tekanan hidup tanpa

kembali pada perilaku lama. Kesadaran diri juga meningkatkan empati, memperbaiki relasi sosial, dan mengurangi konflik baik dengan sesama narapidana maupun petugas. Dalam observasi lapangan, narapidana yang memiliki self-awareness tinggi menunjukkan perubahan signifikan, seperti lebih berhati-hati dalam berbicara, memahami perasaan orang lain, dan menunjukkan penyesalan mendalam atas tindakan masa lalu

b. Dimensi *Self-management* (manajemen diri)

Self-management atau manajemen diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku secara sadar demi mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dalam konteks pemasyarakatan, keterampilan ini menjadi pilar penting karena membantu narapidana merespons tekanan sosial secara adaptif, mengendalikan dorongan impulsif, serta mengambil keputusan secara rasional. Bagi narapidana geng yang terbiasa hidup reaktif dan emosional, proses ini tidak mudah dan memerlukan latihan yang konsisten melalui program pembinaan. Kegiatan seperti diskusi kelompok, ceramah keagamaan, dan pembinaan disiplin waktu menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kebiasaan berpikir sebelum bertindak, menahan respons negatif, serta belajar menunda kepuasan sesaat. Perubahan perilaku yang tampak, seperti kemampuan menahan amarah, menghormati giliran berbicara, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan disiplin menjalani rutinitas, menunjukkan bahwa keterampilan manajemen diri mulai terbentuk. Proses ini juga diperkuat oleh peran petugas pembinaan yang menjadi teladan dalam bersikap sabar, tenang, dan konsisten memberi arahan. Peningkatan kemampuan manajemen diri tidak hanya berpengaruh pada kehidupan narapidana selama di dalam Lapas, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan sosial setelah bebas. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana dengan tingkat kontrol emosi yang baik cenderung memiliki risiko residivisme yang lebih rendah karena lebih mampu berpikir jernih sebelum bertindak. Selain itu, kemampuan ini membantu mereka mengelola rasa marah, kecewa, dan bersalah dengan cara yang konstruktif, seperti menulis jurnal atau memilih menyelesaikan konflik secara damai. Kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan juga berperan penting dalam memperkuat disiplin, ketekunan, serta kemampuan menerima kritik. Semua proses tersebut membentuk pola pikir baru yang lebih stabil, bertanggung jawab, dan adaptif.

c. Dimensi *Self-Motivation* (motivasi diri)

Motivasi diri atau *self-motivation* merupakan kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik tanpa harus didorong oleh faktor eksternal. Dalam konteks pembinaan narapidana geng di Lapas Kelas IIA Bogor, dimensi ini berperan penting untuk mengatasi tekanan mental, konflik batin, dan pengaruh lingkungan negatif yang dapat menghambat proses rehabilitasi. Pembinaan yang efektif tidak hanya mengandalkan ceramah atau kegiatan rutin, tetapi juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk merasakan makna dan nilai dirinya melalui tanggung jawab tertentu, seperti menjadi ketua kelompok atau fasilitator diskusi. Ketika narapidana merasa dihargai dan diberi kepercayaan, muncul kesadaran bahwa mereka masih memiliki potensi dan dapat berguna bagi orang lain. Hal ini menumbuhkan semangat perubahan yang lahir dari dalam diri. Selain itu, kegiatan ibadah dan pembinaan spiritual menjadi titik awal yang kuat dalam membentuk motivasi, karena memberi arah dan tujuan hidup baru yang lebih positif. Motivasi diri yang tumbuh secara intrinsik terbukti lebih efektif dan bertahan lama dibandingkan motivasi yang bersifat eksternal, seperti ancaman hukuman atau keinginan memperoleh remisi. Narapidana yang memiliki tujuan hidup jelas selama masa pembinaan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih konsisten, disiplin, dan terarah. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam

program, kedatangan tepat waktu, partisipasi dalam diskusi, hingga semangat memotivasi sesama narapidana. Dukungan emosional dari petugas pembinaan, komunikasi yang empatik, serta suasana yang bebas dari intimidasi juga menjadi faktor penting dalam memelihara motivasi tersebut. Melalui kegiatan seperti lomba pidato, penulisan esai pengalaman hidup, mentoring, hingga rutinitas spiritual, narapidana belajar menemukan makna hidup dan keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik.

d. Dimensi *Empathy* (empati)

Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain serta meresponsnya secara emosional dan kognitif, yang menjadi aspek penting dalam pembinaan narapidana geng di Lapas Kelas IIA Bogor karena membantu mengikis egoisme, dominasi kelompok, dan kecenderungan kekerasan. Melalui kegiatan seperti diskusi tentang dampak kejahatan, sesi bimbingan rohani, dan cerita pengalaman sesama narapidana, mereka diajak melihat konsekuensi tindakan dari sudut pandang korban sehingga tumbuh kesadaran sosial dan rasa bersalah yang mendalam. Proses ini menciptakan perubahan perilaku nyata, seperti munculnya sikap sabar, kemampuan memahami bahasa tubuh orang lain, hingga keinginan memperbaiki hubungan dengan keluarga. Dukungan petugas melalui pendekatan empatik serta suasana kelompok yang aman juga memperkuat perkembangan empati, membuat narapidana lebih peka, peduli, dan mampu menjadi penengah dalam konflik. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan empati berkontribusi pada rendahnya risiko residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial, sehingga pembinaan berbasis empati perlu terus dikembangkan melalui metode reflektif, komunikasi non-kekerasan, dan kegiatan sosial yang menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain.

e. Dimensi *Social Skills* (kemampuan sosial)

Kemampuan sosial (*social skills*) merupakan seperangkat keterampilan yang memungkinkan individu berinteraksi secara efektif, membangun komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial yang penuh tekanan, sehingga menjadi aspek penting dalam pembinaan narapidana geng di Lapas Kelas IIA Bogor. Melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, ibadah bersama, pelatihan keterampilan, hingga forum dialog terbuka, narapidana dilatih untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan secara aktif, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam tim. Proses ini secara bertahap mengubah pola komunikasi mereka yang sebelumnya keras, tertutup, dan agresif menjadi lebih empatik, sabar, dan solutif. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kemampuan mereka untuk menengahi konflik, menyampaikan pendapat dengan sopan, membangun hubungan di luar geng, serta percaya diri berbicara di depan umum. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan sosial meningkatkan kepercayaan diri, kerja tim, dan kesiapan menghadapi tekanan sosial, yang penting bagi reintegrasi pasca-bebas. Oleh karena itu, pembinaan yang berorientasi pada penguatan kemampuan sosial tidak hanya memperbaiki dinamika kehidupan di dalam lapas, tetapi juga menjadi bekal penting bagi narapidana untuk beradaptasi dan membangun kehidupan yang produktif di masyarakat.

Kendala dalam Mendorong Pembinaan *Self-Improvement* bagi Narapidana yang Tergabung Kelompok Geng

1. Rendahnya Kesadaran Awal Narapidana akan Pentingnya Perubahan Diri

Rendahnya kesadaran awal narapidana akan pentingnya perubahan diri menjadi salah satu hambatan paling mendasar dalam pelaksanaan program *Self-Improvement*, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok geng. Banyak di antara mereka masuk ke dalam lembaga

pemasyarakatan dengan membawa pola pikir defensif, apatis, dan terjebak pada mentalitas “bertahan hidup” alih-alih “berubah.” Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kehidupan keras, pengalaman kekerasan, serta nilai-nilai solidaritas geng yang menolak kelembutan dan refleksi diri. Akibatnya, program pembinaan yang ditawarkan seperti diskusi, ibadah, atau pelatihan motivasional sering dipandang tidak relevan, bahkan dianggap sebagai upaya untuk “melemahkan” kekuatan kelompok. Observasi menunjukkan bahwa pada tahap awal, banyak narapidana yang bersikap tertutup, enggan berpartisipasi, bahkan menunjukkan sikap skeptis terhadap kegiatan pembinaan. Fenomena ini mencerminkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada metode pembinaan, melainkan pada kesiapan psikologis narapidana untuk menerima proses perubahan tersebut. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan pentingnya pendekatan empatik dan kontekstual dalam tahap awal pembinaan. Intervensi berbasis mindfulness dan program yang dipersonalisasi terbukti mampu membangkitkan kesadaran diri serta meningkatkan keterlibatan narapidana secara signifikan ketika disesuaikan dengan latar belakang emosional dan pengalaman hidup mereka.

2. Dominasi Solidaritas Geng yang Menghambat Perubahan Individu

Dominasi solidaritas geng menjadi salah satu hambatan paling serius dalam proses *Self-Improvement* narapidana karena identitas kelompok yang kuat sering kali mengalahkan motivasi individu untuk berubah. Geng bukan sekadar kelompok sosial, tetapi juga sistem nilai, cara hidup, dan identitas yang membentuk pola pikir serta perilaku anggotanya. Di dalam lapas, ikatan ini tetap hidup dan berpengaruh, menciptakan tekanan sosial yang membuat narapidana sulit mengambil keputusan secara mandiri. Banyak dari mereka mengikuti pembinaan bukan karena dorongan pribadi, melainkan tekanan kelompok, dan takut dianggap “pengkhianat” jika menunjukkan inisiatif sendiri. Tekanan tersebut sering memicu rasa takut akan pengucilan, kehilangan status, atau dianggap lemah, sehingga mereka memilih untuk pasif dalam kegiatan pembinaan. Akibatnya, proses transformasi diri menjadi sangat terhambat karena setiap langkah perubahan dianggap bertentangan dengan loyalitas terhadap kelompok. Penelitian dan temuan lapangan menunjukkan bahwa tekanan sosial ini tidak hanya menciptakan resistensi individu tetapi juga resistensi kolektif yang bersifat sistemik. Tekanan kelompok dapat mengalahkan motivasi internal, apalagi ketika eksistensi sosial narapidana bergantung pada penerimaan geng. Oleh karena itu, strategi pembinaan perlu dirancang untuk menembus dominasi tersebut dengan menciptakan ruang aman bagi individu agar dapat mengekspresikan identitasnya secara mandiri. Pendekatan yang efektif mencakup pemindahan narapidana ke lingkungan yang lebih heterogen, penyelenggaraan kegiatan lintas kelompok, serta penerapan konseling individual yang fokus pada refleksi diri. Pembinaan yang bersifat personal dan berorientasi pada pengembangan identitas baru terbukti lebih efektif dalam memutus keterikatan terhadap nilai lama.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Tenaga Pembina yang Tidak Seimbang

Keterbatasan sumber daya dan jumlah tenaga pembina yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam upaya mendorong *Self-Improvement* bagi narapidana yang tergabung dalam kelompok geng. Ketimpangan ini tidak hanya menyangkut jumlah petugas, tetapi juga kapasitas, kompetensi, serta beban kerja yang harus mereka tangani. Satu orang pembina sering kali bertanggung jawab atas puluhan bahkan ratusan narapidana dengan latar belakang dan kebutuhan yang sangat beragam, sehingga pendekatan personal yang menjadi inti dari proses rehabilitasi menjadi sulit terwujud. Dampaknya, pembinaan cenderung berjalan secara mekanis dan formalitas tanpa interaksi yang bermakna. Narapidana merasa tidak mendapatkan perhatian individual, umpan balik, atau ruang untuk berdialog, yang justru menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran diri dan motivasi perubahan. Kurangnya kontinuitas

pendampingan juga menyebabkan banyak kegiatan pembinaan kehilangan relevansinya, dan narapidana menjadi pasif karena merasa proses tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap perkembangan pribadi mereka. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pembinaan berbasis rehabilitasi, kehadiran pembina yang kompeten, konsisten, dan mampu membangun relasi emosional merupakan elemen penting dalam mendorong transformasi diri narapidana. Tanpa interaksi intensif, program pembinaan hanya menjadi aktivitas rutin yang minim pengaruh terhadap pembentukan identitas baru.

4. Ketergantungan pada Motivasi Eksternal yang Tidak Berkelanjutan

Ketergantungan pada motivasi eksternal menjadi salah satu hambatan penting dalam proses pembinaan *Self-Improvement* bagi narapidana yang tergabung dalam kelompok geng. Banyak narapidana mengikuti kegiatan pembinaan bukan karena dorongan dari dalam diri, melainkan demi memperoleh keuntungan administratif seperti remisi, pembebasan bersyarat, atau penilaian positif dari petugas. Motivasi semacam ini memang mampu menggerakkan perilaku secara sementara, namun tidak menghasilkan perubahan psikologis dan spiritual yang mendalam. Ketika motivasi hanya bersumber dari luar, partisipasi narapidana sering kali bersifat temporer dan akan menurun drastis setelah tujuan eksternal tercapai atau tidak terpenuhi. Fenomena ini terlihat dari perilaku narapidana yang sangat aktif menjelang evaluasi remisi, namun kembali pasif atau bahkan apatis setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang hanya berorientasi pada insentif eksternal berisiko menciptakan kepatuhan semu tanpa membentuk kesadaran dan karakter baru, sehingga tujuan utama rehabilitasi menjadi sulit tercapai. Strategi pembinaan perlu difokuskan pada upaya menumbuhkan motivasi intrinsik yang lahir dari kesadaran diri dan kemauan untuk berubah. Proses ini dapat dimulai dengan pendekatan personal, refleksi pengalaman hidup, serta dialog yang menggugah pemaknaan akan tujuan hidup. Ketika narapidana diberi ruang untuk merenungkan perjalanan hidupnya, mendengarkan kisah orang lain, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan, mereka lebih mudah menyadari nilai perubahan sebagai kebutuhan personal, bukan sekadar kewajiban administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam mengenai peran Lapas Kelas IIA Bogor dalam mendorong *Self-Improvement* bagi narapidana yang tergabung dalam kelompok geng, dapat disimpulkan bahwa Lapas telah menjalankan perannya secara signifikan sebagai fasilitator rehabilitasi yang tidak hanya menekankan pada aspek pengamanan, tetapi juga pada proses transformasi individu. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur, seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian yang melibatkan kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, konseling, serta pembiasaan perilaku disiplin dan reflektif. Program-program tersebut dirancang tidak hanya sebagai formalitas administratif, melainkan menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai perubahan dan kesadaran moral dalam diri narapidana. Melalui kerangka teori peran, ditemukan bahwa peran Lapas mencakup dimensi harapan peran yang diwujudkan melalui ekspektasi pembinaan spiritual dan sosial; perilaku peran yang terlihat dalam keterlibatan aktif petugas sebagai pendamping; konflik peran yang terjadi saat tuntutan keamanan bertabrakan dengan jadwal pembinaan; ambiguitas peran yang menciptakan kebingungan akibat kurangnya komunikasi yang jelas; kelebihan beban peran yang mengakibatkan kualitas pendampingan menurun; serta persepsi peran yang menentukan sejauh mana petugas memahami dan menginternalisasi tugasnya sebagai agen perubahan. Semua dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan kesadaran institusi terhadap peran rehabilitatif yang diembannya.

Selanjutnya, melalui pendekatan teori *Self-Improvement*, ditemukan bahwa narapidana menunjukkan kemajuan signifikan dalam lima aspek utama pengembangan diri. Pada dimensi *self-awareness*, mereka mulai memahami kesalahan masa lalu, mengenali luka emosional, dan menunjukkan refleksi terhadap pilihan hidupnya. Pada dimensi *Self-management*, narapidana mulai mampu mengontrol emosi, menjalani rutinitas disiplin, dan mengelola waktu serta pikiran secara lebih terarah. Motivasi diri (*self-motivation*) juga tampak meningkat, terutama ketika narapidana diberi kepercayaan dalam peran kecil dan merasa hidupnya masih berarti. Empati (*empathy*) berkembang melalui kegiatan diskusi yang membuka kesadaran tentang penderitaan orang lain, sehingga mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial. Sementara itu, keterampilan sosial terlihat dari semakin sehatnya interaksi antar narapidana, kemampuan berkomunikasi secara terbuka, serta kemauan untuk membantu dan menerima bantuan dari sesama. Keseluruhan perkembangan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pembinaan secara struktural, tetapi juga menandai proses perubahan batin yang mendalam sebagai hasil dari pendekatan pembinaan yang bersifat humanis, reflektif, dan berorientasi jangka panjang.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan *Self-Improvement* juga dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup signifikan. Pertama, adanya subkultur geng yang eksklusif menciptakan hambatan psikologis dan sosial bagi narapidana untuk keluar dari pola pikir lama dan menerima nilai-nilai rehabilitasi. Kedua, ketidakseimbangan antara fungsi pengamanan dan pembinaan membuat banyak kegiatan bersifat tidak konsisten, sehingga menurunkan kepercayaan narapidana terhadap efektivitas program. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja petugas yang berlebihan menyebabkan kurang optimalnya pendampingan serta ketidakhadiran figur pembina yang konsisten. Keempat, kurangnya kejelasan informasi mengenai tujuan dan arah program pembinaan menciptakan kebingungan di kalangan narapidana, yang pada akhirnya membuat mereka menjalani pembinaan tanpa pemahaman yang utuh terhadap manfaatnya. Kendala-kendala ini menjadi faktor struktural dan kultural yang perlu segera diatasi agar pembinaan yang berorientasi pada *Self-Improvement* dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Lapas Kelas IIA Bogor dalam mendorong *Self-Improvement* narapidana geng, serta dengan memperhatikan berbagai kendala yang muncul dalam implementasi pembinaan, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang bersifat membangun. Pertama, Lapas perlu mengembangkan pendekatan pembinaan yang lebih personal dan relasional. Petugas pembinaan harus dibekali pelatihan khusus untuk memahami dinamika sosial geng, sehingga mampu membangun komunikasi yang empatik dan non-diskriminatif. Selain itu, pembentukan kelompok pembinaan yang bersifat inklusif dan terbuka, di mana narapidana dapat saling berbagi pengalaman hidup, diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membuka kesadaran kolektif dalam kelompok, serta mengikis perlahan ikatan destruktif yang terbentuk dalam struktur geng tersebut. Kedua, Lapas perlu menyusun mekanisme kerja yang integratif antara dua fungsi utama tersebut. Program pembinaan yang dijalankan hendaknya tidak diposisikan sebagai aktivitas pelengkap, tetapi sebagai bagian sentral dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Ketiga, Lapas disarankan untuk melakukan penguatan kelembagaan melalui pemetaan ulang beban kerja serta peningkatan kapasitas petugas. Penambahan jumlah tenaga pembinaan, khususnya di bidang pembinaan kepribadian dan spiritual, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pendampingan terhadap narapidana. Selain itu, pelatihan

berkala bagi petugas yang bersifat reflektif dan berbasis pada pendekatan pemasyarakatan modern juga perlu dilakukan agar mereka memiliki sensitivitas sosial dan psikologis yang memadai dalam menghadapi dinamika perilaku narapidana geng. Pelibatan pihak eksternal seperti tokoh agama, konselor profesional, serta organisasi kemasyarakatan dapat menjadi solusi tambahan untuk mengurangi beban petugas dan memperkaya materi pembinaan dengan perspektif yang lebih beragam. Keempat, Lapas diharapkan dapat membangun sistem komunikasi internal yang lebih sistematis, terbuka, dan edukatif. Informasi mengenai tujuan kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta manfaat pembinaan harus disampaikan secara terstruktur kepada seluruh narapidana, baik melalui papan pengumuman, brosur, sesi orientasi, maupun pertemuan langsung yang melibatkan narapidana secara aktif. Ketidakjelasan informasi selama ini terbukti memunculkan ambiguitas peran dan menurunkan motivasi narapidana untuk mengikuti pembinaan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baron, R. A. (2004). *Social psychology: Understanding human interaction*. Boston: Allyn and Bacon.
- Debowska, A., Boduszek, D., & Sherretts, N. (2017). Psychopathy, emotional intelligence, and criminal behavior. *Deviant Behavior*, 38(11), 1240–1251.
<https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1243097>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024, 31 Desember). *Laporan jumlah penghuni Lapas, Rutan, LPKA, dan LPP tahun 2020–2025*. Diakses 7 Januari 2025 dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>
- Dongoran, M. F. (2021). Pembinaan kesehatan mental dengan intervensi senam yoga pada narapidana Lapas IIB Merauke. *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, 2(1), 6–12.
<https://doi.org/10.56313/jmn.v2i1.38>
- Fahreza, G. M. (2023). Optimalisasi layanan kesehatan mental bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 26–31.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113150>
- Fatika, R. A. (2024, 1 Oktober). *Gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan masyarakat Indonesia 2024*. Diakses 4 Januari 2025 dari <https://data.goodstats.id>
- Kaloeti, D. V. (2018). Gambaran depresi narapidana pemasyarakatan X. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 115–123.
<https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.4156>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi sosial* (Edisi ke-10). Jakarta: Salemba Humanika.
- Nawawi, H. (2002). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paterline, B. A., & Orr, D. (2016). Adaptation to prison and inmate self-concept. *Journal of Psychology and Behavioral Science*, 4(2), 70–79.
- Rudi, A. (2023). Efektivitas client-centered therapy terhadap perilaku agresif.
- Saleh, A. A. (2020). *Psikologi sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Shrestha, G. Y. (2017). Depression among inmates in a regional prison of Eastern Nepal: A cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 17(1), 1–9.
<https://doi.org/10.1186/s12888-017-1514-9>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamimy, M. F. (2021, 2 Februari). *Problematika kesehatan mental narapidana*. Diakses 4 Januari 2025 dari <http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana>
- The Zebra. (2024, 26 Juli). *Mental health statistics*. Diakses 4 Januari 2025 dari <https://www.thezebra.com/resources/research/mental-health-statistics>
- Universitas Negeri Malang. (2024, 6 Mei). *Kasus mental health meningkat, dosen UMM jelaskan penyebab dan solusinya*. Diakses 4 Januari 2025 dari <https://www.umm.ac.id>
- Yusuf, N. (2015). *Buku ajar: Keperawatan kesehatan jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Zainuddin, I., & Zainuddin, I. (2023). *Metode penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.